

**RENCANA KERJA
BIRO PERENCANAAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan semangat peningkatan kualitas kinerja Biro Perencanaan, penyusunan Rencana Kerja (Renja) menjadi langkah strategis untuk memetakan perjalanan kerja pada tahun mendatang. Renja ini merangkum berbagai aspek, termasuk strategi dan arah kebijakan yang mendukung rencana kegiatan dan alokasi anggaran.

Dokumen ini juga mencerminkan komitmen Biro Perencanaan dalam melaksanakan kebijakan P4GN berbasis bukti. Pentingnya kajian lintas disiplin untuk formulasi kebijakan P4GN diutarakan dalam konteks Renja. Dokumen tersebut menekankan perlunya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui ketersediaan dokumen perencanaan yang baik. Selain itu, Renja diharapkan menjadi pedoman dan acuan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai arah dan kebijakan pemerintah.

Renja Biro Perencanaan tidak hanya sekadar rencana kerja, tetapi juga representasi dari semangat inovasi dan respons terhadap perubahan. Dengan melibatkan kajian lintas disiplin, Biro Perencanaan berupaya mencapai ketepatan kebijakan dan integrasi data yang mendasar. Dokumen ini menjadi fondasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien, sesuai dengan visi dan misi Biro Perencanaan. Semoga Renja Biro Perencanaan Settama BNN ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai tujuan organisasi serta mewujudkan sinergi antar unit kerja di lingkungan BNN.

Jakarta, Desember 2023

Kepala Biro Perencanaan
Sekretariat Utama BNN



Mardiharto Tjokrowasito, SH LLM

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Untuk meningkatkan pembangunan yang lebih baik dimasa mendatang diperlukan Renja, yang berisi Tujuan dan Sasaran serta program dan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai Visi dan Misi BNN.

Renja Biro Perencanaan Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis BNN Tahun 2020–2024. Renja Biro Perencanaan Settama BNN Tahun 20204 adalah Pelaksanaan Renstra Tahun Pertama sebagai dokumen yang berisikan program-program dan kegiatan yang memberikan gambaran tentang hal-hal yang akan dilakukan dan dicapai pada Tahun 2024. Sedangkan Rencana Strategis BNN menggambarkan tujuan jangka menengah, sasaran tahunan dan indikator kinerja sasaran. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi usaha yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi, dan kerangka untuk perencanaan kinerja dan anggaran tahunan. Adapun maksud dari disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memberikan pedoman atau arah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RKT) Biro Perencanaan Settama BNN untuk mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dan sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

I. PERMASALAHAN

Dalam periode 2020-2024, Biro Perencanaan BNN mengambil langkah-langkah taktis dan strategis untuk meningkatkan kualitas kinerja. Proses ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dikenal dengan istilah 5 M (Manusia, Uang, Material, Metode, dan Mesin), yang merupakan sumber daya organisasi. Biro Perencanaan, bertugas mengoordinasikan perencanaan program dan kegiatan di BNN, melakukan identifikasi dan analisis terhadap ketersediaan serta fungsi sumber daya untuk pengelolaan program kegiatan. Ini penting untuk mencegah kesalahan tata kelola dan memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya sesuai mandat BNN. Tantangan

dan Upaya Peningkatan: Dukungan SDM di Biro Perencanaan masih kurang, terbatas dalam analisis program kegiatan BNN. Aparatur Biro Perencanaan terbatas, dengan beberapa yang melakukan tugas "multi jabatan". Alokasi anggaran terbatas untuk koordinasi dan pelaksanaan tugas perencanaan program kegiatan. Peningkatan Peran Biro Perencanaan: Perlu pemenuhan kebutuhan SDM perencanaan yang berwawasan luas dan memiliki kemampuan analisis mendalam. Ketersediaan sumber daya aparatur potensial memungkinkan pelaksanaan tugas yang lebih cermat dan substantif. Meningkatkan Kualitas Perencanaan P4GN.

Biro Perencanaan perlu meningkatkan kajian lintas disiplin untuk formulasi kebijakan P4GN berbasis bukti.

Menurut Dokumen Perencanaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Nomor 13 Tahun 2020, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki kebijakan untuk meningkatkan kajian lintas disiplin. Pendekatan ini tercermin dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Namun, dokumen tersebut tidak secara spesifik membahas Biro Perencanaan.

Meningkatkan kajian lintas disiplin dalam Biro Perencanaan untuk formulasi kebijakan P4GN berbasis bukti akan memberikan beberapa keuntungan:

Ketepatan Kebijakan: Kajian lintas disiplin dapat membawa perspektif yang lebih luas dan mendalam, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan kompleksitas permasalahan P4GN.

Integrasi Data: Dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, Biro Perencanaan dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber, memberikan dasar bukti yang kuat untuk merumuskan kebijakan.

Inovasi: Pendekatan lintas disiplin dapat merangsang inovasi dan pemikiran kreatif dalam formulasi kebijakan, membantu Biro Perencanaan untuk menemukan solusi yang lebih efektif dan efisien.

Respons Terhadap Perubahan: Kajian lintas disiplin memungkinkan Biro Perencanaan untuk lebih responsif terhadap perubahan lingkungan, termasuk perkembangan terbaru dalam bidang P4GN.

II. HASIL EVALUASI

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja sebagai bagian dari manajemen kinerja di lingkungan BNN telah menunjukkan peningkatan, meskipun belum sepenuhnya sesuai harapan. Berdasarkan penilaian AKIP BNN oleh Kemenpan RB, skor meningkat dari tiga tahun terakhir tercatat 65,32 (2020), 66,60, dan 2022 menjadi (68,53). Meski demikian, masih ada banyak area yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan sistem manajemen kinerja di BNN.

Peran Biro Perencanaan dalam Peningkatan Akuntabilitas Kinerja:

1. Biro Perencanaan memiliki peran krusial dalam mengelola program dukungan manajemen, terutama terkait perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan hasil program kegiatan.
2. Langkah-langkah strategis dari Biro Perencanaan diperlukan untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja BNN.

Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja:

1. Pengembangan instrumen pendukung sistem manajemen kinerja.
2. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas manajemen kinerja di semua unit organisasi BNN.
3. Penyusunan dokumen sistem akuntabilitas, mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Adaptasi terhadap Kebijakan RSPP (Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran) adalah BNN perlu mengadaptasi kebijakan RSPP dalam tata kelola perencanaan dan penganggaran di lingkungan mereka.

Internalisasi Pengelolaan Kepatuhan dan Pelaporan:

Diperlukan internalisasi di kalangan aparatur untuk memastikan kepatuhan dan perbaikan dalam pelaporan data realisasi kinerja dan anggaran.

Semangat Peningkatan Kualitas Manajemen Kinerja:

Upaya untuk memperkuat pemahaman dan komitmen dalam mengelola kinerja BNN perlu ditingkatkan.

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024; dan
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II
RENCANA KERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BIRO PERENCANAAN SETTAMA BNN TAHUN 2024

Pada tahun anggaran 2024, BNN telah menetapkan target kinerja dan alokasi pendanaan untuk seluruh unit kerjanya. Penetapan target kinerja ini disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya pada tahun 2024. Biro Perencanaan memiliki fokus dalam **Meningkatkan Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif Dan Efisien**. Salah satu indikator kunci yang digunakan adalah Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BNN. NKA merupakan nilai rerata dari capaian nilai kinerja anggaran di semua unit kerja BNN, baik di tingkat pusat maupun wilayah.

Rincian Target Kinerja Biro Perencanaan:

- 1. Fokus pada peningkatan proses manajemen kinerja.
- 2. Menggunakan Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BNN sebagai ukuran kinerja.
- 3. NKA mencerminkan nilai rerata capaian kinerja anggaran di seluruh unit kerja BNN.
- 4. Alokasi anggaran didistribusikan ke seluruh unit kerja untuk mendukung tugas dan fungsi perencanaan.

Dengan penetapan ini, diharapkan Biro Perencanaan dapat berkontribusi secara signifikan dalam mencapai sasaran kegiatan BNN dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas manajemen kinerja di seluruh organisasi.

Matrik Target Kinerja Biro Perencanan BNN
Tahun 2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	93	12.213.314.000

Matrik Rincian Output dan Anggaran
Tahun 2024

NO	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	KEBUTUHAN PENDANAAN
1	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.908.474.000
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5.304.840.000

BAB III

PENUTUP

Renja menjadi bagian penting dalam perencanaan kinerja bagi semua unit kerja. Sebagai unit vertikal, BNN menerapkan pola distribusi beban kinerja dan alokasi anggaran di seluruh unit kerja vertikalnya. Dokumen Renja Biro Perencanaan bukan hanya sekadar catatan rencana kinerja, tetapi juga berfungsi sebagai sarana transparansi untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan "**Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN**" bersama unit kerja lainnya di BNN, terutama unit vertikal. Dengan adanya Renja ini, diharapkan dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas kinerja di lingkungan BNN. Ketersediaan dokumen perencanaan kinerja yang baik menjadi langkah awal untuk mencapai hal tersebut. Semoga Renja Biro Perencanaan Settama BNN dapat menjadi panduan yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengacu pada prinsip good governance.

LAMPIRAN I
Matrik Rencana Volume Rincian Output Biro Perencanaan BNN
Tahun 2024

NO	UNIT SATKER	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KEBUTUHAN PENDANAAN
1	BIRO PERENCANAAN	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2	5.256.668.000
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	3.053.125.000
2	BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	403	1.426.709.000
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	409	1.497.441.000

LAMPIRAN II
Matrik Sebaran Alokasi Anggaran dan Volume Unit Kerja Vertikal
Tahun 2024

KODE	PROVINSI/SATKER	3238.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran		3238.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Total Anggaran
		volume	Anggaran	volume	Anggaran	
01	DKI JAKARTA					
15405	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	2	2.160.000	2	4.931.000	7.091.000
15515	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	2	2.160.000	2	4.931.000	7.091.000
419258	BNN KOTA JAKARTA UTARA	2	2.160.000	2	4.931.000	7.091.000
682448	BNN PROVINSI DKI JAKARTA	1	5.256.000	1	9.979.000	15.235.000
2	JAWA BARAT					-
20558	BNN KABUPATEN BOGOR	2	6.304.000	2	6.847.000	13.151.000
20761	BNN KABUPATEN CIANJUR	2	6.184.000	2	6.787.000	12.971.000
25137	BNN KOTA BANDUNG	2	1.920.000	2	4.655.000	6.575.000
25447	BNN KOTA CIREBON	2	7.100.000	2	6.261.000	13.361.000
26118	BNN KOTA CIMAHI	2	5.996.000	2	6.693.000	12.689.000
403714	BNN KABUPATEN SUMEDANG	2	6.244.000	2	6.817.000	13.061.000
418317	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	2	6.424.000	2	6.907.000	13.331.000
418318	BNN KOTA TASIKMALAYA	2	6.304.000	2	6.847.000	13.151.000
419227	BNN KABUPATEN SUKABUMI	2	6.228.000	2	6.809.000	13.037.000
682469	BNN PROVINSI JAWA BARAT	2	9.412.000	2	11.471.000	20.883.000
682778	BNN KABUPATEN GARUT	2	6.296.000	2	6.843.000	13.139.000
682782	BNN KABUPATEN KUNINGAN	2	6.424.000	2	6.907.000	13.331.000

682799	BNN KABUPATEN CIAMIS	2	6.304.000	2	6.847.000	13.151.000
689561	BNN KOTA DEPOK	2	6.811.000	2	6.520.000	13.331.000
689575	BNN KABUPATEN KARAWANG	2	6.316.000	2	6.853.000	13.169.000
3	JAWA TENGAH					-
31963	BNN KABUPATEN MAGELANG	2	6.180.000	2	6.629.000	12.809.000
32057	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	2	6.514.000	2	6.295.000	12.809.000
35665	BNN KOTA SURAKARTA	2	6.200.000	2	6.639.000	12.839.000
419228	BNN KOTA TEGAL	2	6.260.000	2	6.669.000	12.929.000
419246	BNN KABUPATEN BANYUMAS	2	6.248.000	2	6.663.000	12.911.000
682473	BNN PROVINSI JAWA TENGAH	2	7.468.000	2	10.097.000	17.565.000
682804	BNN KABUPATEN CILACAP	2	6.340.000	2	6.709.000	13.049.000
682811	BNN KABUPATEN KENDAL	2	6.140.000	2	6.609.000	12.749.000
689582	BNN KABUPATEN BATANG	2	6.180.000	2	6.629.000	12.809.000
689596	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	2	6.300.000	2	6.689.000	12.989.000
4	DI YOGYAKARTA					-
40173	BNN KABUPATEN BANTUL	2	6.900.000	2	6.963.000	13.863.000
40256	BNN KABUPATEN SLEMAN	2	5.360.000	2	8.203.000	13.563.000
45165	BNN KOTA YOGYAKARTA	2	1.500.000	2	4.893.000	6.393.000
682494	BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	2	5.088.000	2	9.307.000	14.395.000
5	JAWA TIMUR					-
52858	BNN KABUPATEN TUBAN	2	7.405.000	2	6.360.000	13.765.000
403715	BNN KABUPATEN PASURUAN	2	6.628.000	2	7.035.000	13.663.000
419247	BNN KABUPATEN SUMENEP	2	7.215.000	2	6.610.000	13.825.000
419248	BNN KOTA MOJOKERTO	2	6.616.000	2	7.029.000	13.645.000
682480	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	2	10.348.000	2	12.053.000	22.401.000
682825	BNN KOTA MALANG	2	6.628.000	2	7.035.000	13.663.000
682832	BNN KOTA BATU	2	6.684.000	2	7.063.000	13.747.000

682846	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	2	6.696.000	2	7.069.000	13.765.000
682850	BNN KABUPATEN NGANJUK	2	6.696.000	2	7.069.000	13.765.000
689554	BNN KABUPATEN SIDOARJO	2	6.676.000	2	7.059.000	13.735.000
689601	BNN KOTA SURABAYA	2	300.000	2	3.871.000	4.171.000
689618	BNN KOTA KEDIRI	2	6.656.000	2	7.049.000	13.705.000
689622	BNN KABUPATEN MALANG	2	6.628.000	2	7.035.000	13.663.000
689639	BNN KABUPATEN GRESIK	2	6.685.000	2	6.960.000	13.645.000
689643	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	2	6.696.000	2	7.069.000	13.765.000
689650	BNN KABUPATEN LUMAJANG	2	6.760.000	2	7.101.000	13.861.000
689664	BNN KABUPATEN BLITAR	2	7.265.000	2	6.560.000	13.825.000
689671	BNN KABUPATEN KEDIRI	2	6.656.000	2	7.049.000	13.705.000
6	ACEH					-
60534	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	2	6.540.000	2	7.030.000	13.570.000
61331	BNN KABUPATEN GAYO LUES	2	6.720.000	2	7.120.000	13.840.000
61818	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	2	6.060.000	2	6.790.000	12.850.000
65137	BNN KOTA BANDA ACEH	2	1.740.000	2	4.630.000	6.370.000
418305	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	1	5.160.000	2	5.160.000	10.320.000
418307	BNN KABUPATEN PIDIE	2	6.406.000	2	6.354.000	12.760.000
419175	BNN KOTA SABANG	2	6.584.000	2	7.052.000	13.636.000
682541	BNN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	2	7.076.000	2	10.030.000	17.106.000
682871	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	2	6.200.000	2	6.860.000	13.060.000
682888	BNN KOTA LANGSA	2	6.444.000	2	6.982.000	13.426.000
689444	BNN KABUPATEN BIREUEN	2	6.120.000	2	6.820.000	12.940.000
7	SUMATERA UTARA					-
70258	BNN KABUPATEN KARO	2	18.072.000	2	10.992.000	29.064.000
70545	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	2	6.072.000	2	6.718.000	12.790.000

70639	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	2	6.216.000	2	6.790.000	13.006.000
72117	BNN KABUPATEN BATU BARA	1	5.916.000	1	6.640.000	12.556.000
75345	BNN KOTA BINJAI	2	7.040.000	2	5.246.000	12.286.000
75540	BNN KOTA TANJUNG BALAI	2	16.242.000	2	11.106.000	27.348.000
418308	BNN KOTA TEBING TINGGI	2	5.760.000	2	6.251.000	12.011.000
419176	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	2	10.872.000	2	9.118.000	19.990.000
682579	BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	2	7.964.000	2	10.404.000	18.368.000
682921	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	2	15.200.000	2	4.970.000	20.170.000
682935	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	2	6.560.000	2	5.996.000	12.556.000
682942	BNN KABUPATEN LANGKAT	2	6.270.000	2	6.052.000	12.322.000
689451	BNN KABUPATEN ASAHAN	2	6.052.000	2	6.708.000	12.760.000
689465	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	2	37.856.000	2	21.368.000	59.224.000
689472	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	2	23.674.000	2	9.438.000	33.112.000
689486	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	1	5.816.000	1	6.590.000	12.406.000
8	SUMATERA BARAT					-
81240	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	2	6.084.000	2	6.685.000	12.769.000
418309	BNN KABUPATEN SOLOK	2	5.924.000	2	6.605.000	12.529.000
419177	BNN KOTA SAWAHLUNTO	1	5.944.000	1	6.615.000	12.559.000
682583	BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	2	5.116.000	2	9.091.000	14.207.000
682956	BNN KOTA PAYAKUMBUH	2	9.249.000	2	3.370.000	12.619.000
9	RIAU					-
91236	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	2	6.975.000	2	6.845.000	13.820.000
403710	BNN KOTA DUMAI	2	7.228.000	2	7.192.000	14.420.000
419222	BNN KABUPATEN PELALAWAN	2	7.480.000	2	5.890.000	13.370.000
682605	BNN PROVINSI RIAU	2	6.704.000	2	26.560.000	33.264.000
689529	BNN KOTA PEKANBARU	2	1.200.000	2	5.078.000	6.278.000
10	JAMBI					-

419203	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	2	5.300.000	2	6.267.000	11.567.000
682590	BNN PROVINSI JAMBI	2	5.004.000	2	8.769.000	13.773.000
689508	BNN KOTA JAMBI	2	3.120.000	2	5.177.000	8.297.000
689512	BNN KABUPATEN BATANGHARI	2	5.240.000	2	6.237.000	11.477.000
11	SUMATERA SELATAN					-
111079	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	2	10.100.000	2	3.625.000	13.725.000
403709	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	2	10.040.000	2	3.445.000	13.485.000
418310	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	2	6.664.000	2	7.001.000	13.665.000
418311	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	2	8.275.000	2	5.900.000	14.175.000
419202	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	2	6.544.000	2	6.941.000	13.485.000
682562	BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	2	8.189.000	2	9.800.000	17.989.000
682892	BNN KOTA PAGARALAM	2	6.844.000	2	7.091.000	13.935.000
682900	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	2	8.098.000	2	5.897.000	13.995.000
682914	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	2	10.510.000	2	3.635.000	14.145.000
689490	BNN KOTA PRABUMULIH	2	9.320.000	2	4.165.000	13.485.000
12	LAMPUNG					-
120855	BNN KABUPATEN WAY KANAN	2	5.680.000	2	6.470.000	12.150.000
418315	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	2	5.584.000	2	6.422.000	12.006.000
418316	BNN KOTA METRO	2	5.536.000	2	6.398.000	11.934.000
419224	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	2	5.560.000	2	6.410.000	11.970.000
682502	BNN PROVINSI LAMPUNG	2	5.404.000	2	9.112.000	14.516.000
689533	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	2	5.416.000	2	6.518.000	11.934.000
13	KALIMANTAN BARAT					-
130761	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	2	5.556.000	2	6.342.000	11.898.000
418319	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	2	8.440.000	2	2.948.000	11.388.000
419249	BNN KABUPATEN SINTANG	2	6.000.000	2	6.630.000	12.630.000

682630	BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1	6.048.000	1	9.410.000	15.458.000
682981	BNN KOTA PONTIANAK	2	1.800.000	2	4.530.000	6.330.000
682998	BNN KOTA SINGKAWANG	2	5.460.000	2	6.360.000	11.820.000
689685	BNN KABUPATEN SANGGAU	2	5.644.000	2	6.452.000	12.096.000
689692	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	2	6.036.000	2	5.622.000	11.658.000
14	KALIMANTAN TENGAH					-
145161	BNN KOTA PALANGKARAYA	2	1.740.000	2	4.435.000	6.175.000
419256	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	2	6.496.000	2	6.813.000	13.309.000
682668	BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2	5.280.000	2	8.235.000	13.515.000
15	KALIMANTAN SELATAN					-
150243	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	2	5.868.000	2	6.577.000	12.445.000
150751	BNN KABUPATEN TABALONG	2	6.004.000	2	6.645.000	12.649.000
150958	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	2	5.940.000	2	6.613.000	12.553.000
418322	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	2	5.868.000	2	6.577.000	12.445.000
419257	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	2	5.868.000	2	6.577.000	12.445.000
682647	BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2	6.364.000	2	9.421.000	15.785.000
683000	BNN KOTA BANJARMASIN	2	1.800.000	2	4.543.000	6.343.000
689011	BNN KOTA BANJARBARU	2	5.968.000	2	6.627.000	12.595.000
689707	BNN KABUPATEN BALANGAN	2	6.205.000	2	6.420.000	12.625.000
16	KALIMANTAN TIMUR					-
165249	BNN KOTA BALIKPAPAN	2	7.996.000	2	7.719.000	15.715.000
165441	BNN KOTA BONTANG	2	8.196.000	2	7.819.000	16.015.000
682651	BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	2	18.956.000	2	5.890.000	24.846.000
689025	BNN KOTA SAMARINDA	2	2.460.000	2	3.241.000	5.701.000
17	SULAWESI UTARA					-
418323	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	2	9.500.000	2	8.640.000	18.140.000

419259	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	2	7.132.000	2	7.456.000	14.588.000
682672	BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	2	5.692.000	2	9.760.000	15.452.000
689760	BNN KOTA BITUNG	2	6.832.000	2	7.306.000	14.138.000
689774	BNN KOTA MANADO	2	1.800.000	2	4.790.000	6.590.000
18	SULAWESI TENGAH					-
419261	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	2	7.984.000	2	7.596.000	15.580.000
682689	BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	2	5.740.000	2	10.006.000	15.746.000
689032	BNN KABUPATEN MOROWALI	2	7.624.000	2	7.416.000	15.040.000
689711	BNN KOTA PALU	2	1.800.000	2	4.504.000	6.304.000
689728	BNN KABUPATEN DONGGALA	2	6.500.000	2	6.920.000	13.420.000
689732	BNN KABUPATEN POSO	2	8.200.000	2	6.120.000	14.320.000
689749	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	2	7.424.000	2	7.316.000	14.740.000
19	SULAWESI SELATAN					-
190633	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	1	9.816.000	1	4.410.000	14.226.000
419260	BNN KABUPATEN BONE	2	6.520.000	2	7.046.000	13.566.000
682693	BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	2	5.396.000	2	9.938.000	15.334.000
689046	BNN KOTA PALOPO	2	6.960.000	2	7.266.000	14.226.000
20	SULAWESI TENGGARA					-
205232	BNN KOTA BAU-BAU	2	8.592.000	1	7.952.000	16.544.000
419262	BNN KABUPATEN MUNA	2	10.360.000	2	6.880.000	17.240.000
682701	BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	2	2.268.000	2	12.850.000	15.118.000
689050	BNN KABUPATEN KOLAKA	2	6.904.000	2	7.108.000	14.012.000
689753	BNN KOTA KENDARI	2	1.800.000	2	4.556.000	6.356.000
21	MALUKU					-
419279	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	2	7.268.000	2	7.537.000	14.805.000
682736	BNN PROVINSI MALUKU	2	3.600.000	2	11.575.000	15.175.000
689863	BNN KOTA TUAL	2	7.268.000	2	7.537.000	14.805.000

22	BALI					-
220155	BNN KABUPATEN BULELENG	2	8.492.000	2	7.980.000	16.472.000
220348	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	2	3.710.000	2	7.580.000	11.290.000
220547	BNN KABUPATEN KARANGASEM	2	8.640.000	2	7.820.000	16.460.000
682516	BNN PROVINSI BALI	2	6.634.000	2	9.600.000	16.234.000
689800	BNN KOTA DENPASAR	2	1.550.000	2	5.244.000	6.794.000
689817	BNN KABUPATEN BADUNG	2	8.184.000	2	7.826.000	16.010.000
689821	BNN KABUPATEN GIANYAR	2	8.332.000	2	7.900.000	16.232.000
23	NUSA TENGGARA BARAT					-
418324	BNN KABUPATEN SUMBAWA	2	11.116.000	2	9.162.000	20.278.000
419264	BNN KABUPATEN BIMA	2	12.116.000	2	9.662.000	21.778.000
682520	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	2	5.244.000	2	11.130.000	16.374.000
682867	BNN KOTA MATARAM	2	1.980.000	2	4.594.000	6.574.000
689838	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	2	8.716.000	2	7.962.000	16.678.000
24	NUSA TENGGARA TIMUR					-
419265	BNN KABUPATEN BELU	2	6.632.000	2	6.972.000	13.604.000
682537	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	2	5.172.000	2	8.982.000	14.154.000
689842	BNN KOTA KUPANG	2	4.672.000	2	5.992.000	10.664.000
689859	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	2	6.132.000	2	6.722.000	12.854.000
25	PAPUA					-
419286	BNN KABUPATEN MIMIKA	1	15.880.000	1	11.973.000	27.853.000
682757	BNN PROVINSI PAPUA	2	5.356.000	2	13.371.000	18.727.000
689067	BNN KABUPATEN JAYAPURA	2	10.032.000	2	9.049.000	19.081.000
26	BENGKULU					-
418313	BNN KOTA BENGKULU	2	1.800.000	2	4.530.000	6.330.000
419223	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	2	6.424.000	2	6.842.000	13.266.000
682558	BNN PROVINSI BENGKULU	2	4.636.000	2	8.798.000	13.434.000
28	MALUKU UTARA					-

419280	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	2	10.708.000	2	2.050.000	12.758.000
682740	BNN PROVINSI MALUKU UTARA	2	15.884.000	2	14.830.000	30.714.000
689870	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	2	5.860.000	2	6.898.000	12.758.000
689884	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	2	8.600.000	2	8.268.000	16.868.000
29	BANTEN					-
295420	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	2	9.640.000	2	3.915.000	13.555.000
403711	BNN KOTA TANGERANG	2	10.311.000	2	3.040.000	13.351.000
419226	BNN KOTA CILEGON	1	7.373.000	1	5.060.000	12.433.000
682452	BNN PROVINSI BANTEN	2	5.389.000	2	9.340.000	14.729.000
30	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG					-
403713	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	2	6.156.000	2	6.682.000	12.838.000
419225	BNN KABUPATEN BANGKA	2	6.056.000	2	6.632.000	12.688.000
682612	BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2	5.116.000	2	8.900.000	14.016.000
682960	BNN KOTA PANGKAL PINANG	2	1.860.000	2	4.534.000	6.394.000
689540	BNN KABUPATEN BELITUNG	2	7.776.000	2	7.492.000	15.268.000
31	GORONTALO					-
310153	BNN KABUPATEN GORONTALO	2	7.240.000	2	7.224.000	14.464.000
310721	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	2	7.440.000	2	7.324.000	14.764.000
419263	BNN KABUPATEN BOALEMO	1	7.568.000	1	7.496.000	15.064.000
682715	BNN PROVINSI GORONTALO	2	5.260.000	2	9.472.000	14.732.000
689781	BNN KOTA GORONTALO	2	1.800.000	2	4.504.000	6.304.000
689795	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	2	6.840.000	2	7.024.000	13.864.000
32	KEPULAUAN RIAU					-
320229	BNN KABUPATEN KARIMUN	2	6.684.000	2	7.050.000	13.734.000
325136	BNN KOTA BATAM	2	1.800.000	2	4.608.000	6.408.000
682626	BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2	30.146.000	2	7.982.000	38.128.000
682977	BNN KOTA TANJUNG PINANG	2	6.784.000	2	7.100.000	13.884.000

33	PAPUA BARAT					-
682761	BNN PROVINSI PAPUA BARAT	2	600.000	2	4.431.000	5.031.000
34	SULAWESI BARAT					-
403716	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	2	6.316.000	2	6.879.000	13.195.000
682722	BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	2	1.700.000	2	12.079.000	13.779.000
35	KALIMANTAN UTARA					-
165352	BNN KOTA TARAKAN	2	1.920.000	2	4.629.000	6.549.000
403708	BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1	19.340.000	7	16.757.000	36.097.000
418320	BNN KABUPATEN NUNUKAN	2	7.236.000	2	7.287.000	14.523.000
TOTAL		403	1.426.709.000	409	1.497.441.000	2.924.150.000